

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerajaan Aceh merupakan kesultanan yang terletak diujung pulau Sumatera yang sudah eksis sejak abad ke- 16. Pada masa ini Aceh menjadi daerah yang sangat maju dalam segala hal baik ekonomi dan militer, sehingga banyak bangsa luar yang ingin menguasai Aceh untuk dijadikan daerah jajahan bangsa luar, manakala terjadi konflik antara Aceh dengan Kolonial Belanda di tahun 1873.

Selama abad ke-19, dan terlebih lagi sejak awal abad ke-20, Hindia Belanda telah tumbuh menjadi ‘negara kolonial’ (kolonial-staat) yang sempurna. Jawa adalah jantung kekuasaan kolonial dan daerah-daerah di luar Jawa secara perlahan tapi pasti mulai dianeksasi satu persatu lewat peperangan, lalu diiringi dengan masa tenang lewat politik ‘pasifikasi’ (Mestika Zed, 2017:94).

Perluasan wilayah dan kekuasaan Kolonial yang bertujuan menguasai secara langsung seluruh daerah Nusantara dan juga untuk memperluas penanaman modal swasta Belanda di Aceh Timur. Perluasan penanaman modal swasta Belanda itu, terutama ditujukan kepada daerah-daerah yang potensial bagi usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan di Nusantara khususnya Aceh.

Dalam rangka perluasan wilayah dan kekuasaan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan ekspedisi militer untuk memaksa dan menaklukkan berbagai kesultanan di nusantara juga termasuk kesultanan di Aceh, yang tujuannya untuk bersedia menyerahkan kekuasaannya atau yang belum dikuasai secara langsung oleh Kolonial. Dalam kenyataannya yang mendasari

pemerintah Hindia Belanda melancarkan ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Sedangkan ekspansi Aceh terjadi pada tahun 1873. Tindakan militer Belanda yang bar-bar terhadap kerajaan-kerajaan yang berdaulat itu dikenal dengan “politik pasifikasi”. Namun di balik kebijakan itu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Sebab secara de jure wilayah Hindia Belanda berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Aceh yang merupakan sebuah kekuasaan politik terbesar di ujung Pulau Sumatra. Di antara sekian banyak kerajaan, Aceh adalah salah satu-satunya yang sangat berani menolak bangsa Eropa untuk membangun benteng di dalam wilayah kekuasaan kesultanan Aceh sebagai tempat pemukiman bagi orang-orang Eropa. Dalam upaya menerapkan politik pasifikasi di Aceh merupakan yang paling tidak mulus seperti daerah nusantara lainya dimana upaya Belanda yang sangat melelahkan sepanjang sejarah kolonialisasi di nusantara. Perang di Aceh dengan Belanda bahwa penaklukan suatu daerah tidak semata-mata bisa dicapai dengan kebijakan represif, walaupun berbagai upaya militer telah dilakukan untuk menekan berbagai perlawanan dilakukan untuk mempercepat konsolidasi politik seperti apa yang dilakukan oleh jenderal Van Heutsz.

Disisi yang lain kolonial Belanda menerapkan politik kemakmuran yang dijalankan oleh Belanda dipandang sebagai usaha untuk mendapatkan pasaran bagi hasil-hasil industrinya, dimana ada sebagian dari kaum kapitalis yang menguasai ekonomi di tanah jajahan dan mengingikan upah rendah di tanah yang murah jajahan Hindia Belanda.

Aceh yang merupakan wilayah terakhir untuk mewujudkan kekuasaan Kolonial Belanda. Bagi pemerintah kolonial, Pasifikasi Aceh sangat melelahkan pihak Belanda, dimana untuk menaklukkan Aceh harus memakan waktu hingga puluhan tahun yang lama, dimana banyak Belanda banyak mengalami kerugian material, fisik serta mental. Ketika masuk abad ke-20, rencana pemerintah Hindia Belanda di mulai lagi untuk kesekian kalinya dengan mengubah kebijakan dalam menaklukkan Aceh. Dengan sepenuhnya. Kemudian pemerintah mencoba melaksanakan suatu kebijakan baru yang disebut sebagai 'Politik Pasifikasi' sebagai lanjutan dari gagasan Snouck Hurgronje, yaitu perlunya sebuah pendekatan yang menunjukkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang mengandalkan kekerasan dan kekuatan militer mulai ditinggalkan demi upaya-upaya damai dan kooperatif yang diharapkan akan menimbulkan simpati, meredam kebencian dan menyuburkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (Ahmad Muhajir, 2018:167).

Ketika Belanda sudah memasuki Aceh khususnya di wilayah pantai timuryang kaya dengan dengan hasil perkebunan sawit dan karet yang sangat luas. Sejak saat itu Belanda mulai dibuka untuk modal swasta Barat sejak 1898, dengan tidak membuang waktu Pemerintah Hindia Belanda secara resmi membuka beberapa perusahaan swasta Barat, perusahaan perkebunan tembakau dari Deli dan juga pertambangan minyak bumi, usaha ini mengalami kegagalan dan ditutup pada 1901. Kegagalan ini berdampak pada kurang baiknya citra wilayah Aceh Timur bagi para investor selama beberapa tahun kemudian. Hubungan Belanda-Aceh mulai pada abad ke-19.

Belanda mulai memperlihatkanitakad hendak menguasaiseluruh wilayah kekuasaan Aceh. Upaya ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh Belanda mengingat wilayah Sumatera, termasuk Aceh, memiliki hubungan dekat dengan Inggris yang menghormati kedaulatan Aceh. Menyerbu dengan menaklukkan langsung ke pusat kerajaan atau wilayah kekuasaan Acehakan mengundang protes

Inggris dan kemarahan wilayah-wilayah kekuasaan Aceh. Oleh karena itulah Belanda menyusun strategi yang matang untuk mencapai tujuan mereka. Strategi-strategi yang dijalankan oleh Belanda sampai akhirnya berhasil menaklukkan pusat Kerajaan Aceh (Anwar, 2017:16).

Dalam menjalankan politik pasifikasi, agar penduduk mau bekerjasama dan tidak melakukan perlawanan, di mana dengan masuknya perusahaan-perusahaan swasta Barat diharapkan akan menyerap tenaga kerja lokal dan tersedianya pasar untuk penjualan produksi penduduk, pembukaan pantai timur Aceh sebagai wilayah perkebunan juga mempunyai kepentingan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari motif pembukaan perkebunan karet pemerintah di Langsa yang menggunakan fasilitas pemerintah. Usaha pemerintah untuk mendatangkan kembali modal Swasta Barat dan meningkatkan iklim penanaman karet di pantai timur mengalami sukses besar dengan pesatnya permintaan konsesi untuk perkebunan tersebut di wilayah ini pada 1908.

Dari apa yang penulis uraikan dari latar belakang di atas, maka penulis akan menarik beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa munculnya politik pasifikasi di Aceh Timur tahun 1908-1942?
2. Bagaimana akibat yang di timbulkan oleh politik pasifikasi kolonial Belanda di Aceh Timur tahun 1908-1942?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis kaji di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui mengapa munculnya politik pasifikasi di Aceh Timur tahun 1908-1942.
2. Ingin mengetahui bagaimana akibat yang di timbulkan oleh politik pasifikasi kolonial Belanda di Aceh Timur tahun 1908-1942.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada semua orang terkhusus kepada mahasiswa di bangku kuliah, dan juga kepada masyarakat luas pada umumnya, hal tersebut terkait dengan politik pasifikasi di Aceh Timur yang memicu perang panjang antara kesultanan Aceh dan Pemerintah Hindia Belanda dalam menaklukkan wilayah di nusantara. Selain itu juga untuk menambah dan memperkaya pengembangan kajian Ilmu Sejarah di Universitas Samudera.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai politik pasifikasi di wilayah Aceh Timur di tahun 1908-1942.

1. Bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam menerapkan teori-teori yang selama ini penulis dapatkan selama berada dibangku kuliah, dan juga menjadi tolak ukur kemampuan penulis didalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah kolonialisasi dalam penerapan politik pasifikasi di Aceh. Dimana bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mahasiswa dalam memahami kolonialisasi di nusantara dan khususnya di Aceh Timur tahun 1908-1942. Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkaya pengetahuan sejarah di Indonesia.
2. Bagi pembaca sendiri penulisan ini sangatlah bermanfaat bagi sumber pengetahuan. Bagi mahasiswa FKIP Sejarah semoga menjadi sumber kajian di bangku kuliah, dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Universitas Samudra dan juga bagi mahasiswa umumnya menjadi bahan bacaan.
3. Bagi pemerintah penulisan ini dapat dijadikan berbagai sumber sejarah Kolonial di Indonesia dan evaluasi mengenai berbagai persoalan penjajahan yang terjadi di Indonesia tahun 1908 sampai dengan tahun 1942, sehingga dapat memicu berbagai persoalan di Indonesia, sehingga menjadi pelajaran di masa yang akan datang.